

ANALISIS KEBIJAKAN PENYESUAIAN KETENTUAN PENDISTRIBUSIAN LPG TABUNG 3 KG DI SUB-PENYALUR TINJAUAN: AGENDA SETTING

Bimo Johan Baskara, Tri Yuniningsih

Program Studi S1 Administrasi Publik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro
Jalan Prof. Soedarto, S. H., Tembalang, Kota Semarang, Kotak Pos 1269
Telepon (024) 7465407, Faksimile (024) 7465405
Laman: www.fisip.undip.ac.id
Email:
fisip@undip.ac.id



ABSTRACT

The restriction policy on the distribution of 3 kg LPG implemented in February 2025 triggered a social crisis and a massive wave of digital protests, forcing the government to cancel the regulation within only four days of implementation. This phenomenon of rapid policy reversal marks a significant shift in public participation, wherein social media transforms into a pressure force capable of vetoing state policies. This research analyzes the agenda-setting dynamics behind the cancellation using the Multiple Streams Framework (MSF) lens and a Mixed-Methods Social Network Analysis (MMSNA) approach. Primary data were collected from 2,250 conversations on platform X (Twitter) during the crisis period and analyzed using Social Network Analysis (SNA) to map network structures and the IndoBERT Deep Learning algorithm for contextual sentiment analysis. The findings reveal the government's structural isolation within digital echo chambers, where technocratic narratives failed to penetrate public discourse. The MSF analysis demonstrates a convergence of three streams: the Problem Stream, peaking due to a focusing event of a citizen's death while queuing; the Political Stream, in the form of government delegitimization; and the failure of the Policy Stream. This situation opened a "Policy Window" utilized by the President as a Policy Entrepreneur to intervene. This study concludes that digital public pressure acts as a primary determinant in policy change. The gap between policy rationality (*Das Sollen*) and field reality (*Das Sein*) was capitalized on by the public into problem-political-policy pressure, demonstrating an awareness that social media can serve as a tool of social control over government policies.

Keywords: *Digital Public Policy, IndoBERT, LPG 3 Kg, Multiple Streams Framework, Social Network Analysis*

ABSTRAK

Kebijakan pembatasan distribusi LPG 3 kg yang diberlakukan pada Februari 2025 memicu krisis sosial dan gelombang protes digital yang masif, memaksa pemerintah membatalkan regulasi tersebut hanya dalam kurun waktu empat hari pasca-implementasi. Fenomena pembatalan cepat (*rapid policy reversal*) ini menandai pergeseran signifikan dalam partisipasi publik, di mana media sosial bertransformasi menjadi kekuatan penekan yang mampu memveto kebijakan negara. Penelitian ini menganalisis dinamika agenda setting di balik pembatalan tersebut menggunakan lensa *Multiple Streams Framework* (MSF) dan pendekatan *Mixed-Methods Social Network Analysis* (MMSNA). Data primer dikumpulkan dari 2.250 percakapan di platform X (Twitter) selama periode krisis dan dianalisis menggunakan *Social Network Analysis* (SNA) untuk memetakan struktur jaringan serta algoritma *Deep Learning* IndoBERT untuk analisis sentimen kontekstual. Temuan penelitian mengungkap adanya isolasi struktural pemerintah dalam *echo chamber* digital, di mana narasi teknokratis gagal menembus percakapan publik. Analisis MSF menunjukkan terjadinya konvergensi tiga aliran: Aliran Masalah (*Problem Stream*) yang memuncak akibat peristiwa pemfokus (*focusing event*) kematian warga saat mengantre, Aliran Politik (*Political Stream*) berupa delegitimasi pemerintah, dan kegagalan Aliran Kebijakan (*Policy Stream*). Situasi ini membuka "Jendela Kebijakan" yang dimanfaatkan oleh Presiden sebagai *Policy Entrepreneur* untuk melakukan intervensi. Studi ini menyimpulkan bahwa tekanan publik digital bertindak sebagai determinan utama dalam perubahan kebijakan. Kesenjangan antara rasionalitas kebijakan (*Das Sollen*) dan realitas lapangan (*Das Sein*) dikapitalisasi oleh publik menjadi tekanan masalah-politik-kebijakan serta menunjukkan kesadaran bahwa media sosial dapat menjadi alat kontrol sosial terhadap kebijakan pemerintah.

Kata Kunci: *IndoBERT*, Kebijakan Publik Digital, LPG 3 Kg, *Multiple Streams Framework*, *Social Network Analysis*.

PENDAHULUAN

Energi merupakan kebutuhan fundamental yang menopang produktivitas dan keberlangsungan hidup masyarakat, terutama bagi kalangan ekonomi menengah ke bawah. Ketergantungan masif terhadap *Liquefied Petroleum Gas* (LPG) tabung 3 kg di Indonesia bukanlah fenomena alamiah, melainkan hasil rekayasa sosial-ekonomi melalui Program Konversi Minyak Tanah ke Gas yang dimulai pemerintah sejak tahun 2007. Program yang semula bertujuan mulia untuk efisiensi fiskal dan penyediaan energi bersih ini, seiring waktu telah bermetamorfosis menjadi jaring pengaman sosial (*social safety net*) yang vital bagi jutaan rumah tangga miskin dan pelaku usaha mikro. Akibatnya, LPG 3 kg tidak lagi sekadar dipandang sebagai komoditas energi,

melainkan telah menjadi hak publik yang sangat sensitif secara politik dan sosial.

Beban subsidi energi yang terus membengkak dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) menjadi tantangan fiskal yang serius bagi pemerintah. Data historis menunjukkan tren kenaikan konsumsi yang tidak terkendali, di mana realisasi penyaluran LPG bersubsidi meningkat dari 6,84 juta Metrik Ton (MT) pada tahun 2019 menjadi 7,80 juta MT pada tahun 2022. Tren kenaikan ini terus berlanjut hingga tahun 2024, di mana PT Pertamina Patra Niaga mencatat realisasi penyaluran menembus angka 8,22 juta MT, melampaui kuota awal yang ditetapkan pemerintah. Lonjakan volume ini mengindikasikan adanya kebocoran distribusi yang sistemik (BPS, 2025)

Ketimpangan antara data target penerima manfaat dan realisasi distribusi di lapangan menjadi landasan utama urgensi kebijakan baru. Mengacu pada data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE), total individu yang berhak menerima subsidi LPG 3 kg mencapai 189 juta Nomor Induk Kependudukan (NIK) atau setara dengan estimasi 47 juta rumah tangga sasaran. Fakta di lapangan menunjukkan distorsi yang tajam, kajian pemerintah mencatat bahwa sekitar 68% hingga 80% dari total subsidi LPG 3 kg justru dinikmati oleh kelompok rumah tangga mampu (Desil 5 ke atas) (kemenkeu, 2022), sementara masyarakat miskin (Desil 1-4) hanya menikmati sisa porsi kecilnya. Kesenjangan data yang lebar ini mendorong pemerintah untuk

mengambil langkah drastis guna menutup celah distribusi di pasar terbuka yang selama ini sulit diawasi.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) merespons situasi tersebut dengan menerbitkan kebijakan pembatasan melalui Surat Edaran Dirjen Migas No. B-570/MG.05/DJM/2025. Kebijakan yang berlaku efektif mulai 1 Februari 2025 ini secara spesifik melarang penjualan LPG 3 kg di tingkat pengecer (warung kecil) dan memusatkan seluruh transaksi hanya di pangkalan resmi. Secara teknokratis, regulasi ini memiliki rasionalitas yang kuat untuk memangkas rantai distribusi yang panjang, menstabilkan harga sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET), dan memastikan subsidi berbasis NIK benar-benar tepat sasaran.

Realitas implementasi

kebijakan di lapangan (*Das Sein*) sangat kontradiktif dengan harapan ideal perencana kebijakan (*Das Sollen*). Ketidaksiapan infrastruktur pangkalan resmi yang jumlahnya terbatas, ditambah dengan jam operasional yang kaku dan lokasi yang jauh dari pemukiman, menyebabkan akses masyarakat terhadap energi terputus secara tiba-tiba (*kompas.com*). Akibatnya, terjadi kekacauan distribusi yang masif di berbagai daerah, ditandai dengan kelangkaan stok, antrean panjang warga yang mengular, hingga lonjakan harga di pasar gelap yang mencekik daya beli masyarakat dan mematikan operasional UMKM (BPKN, 2025).

Eskalasi terus memuncak hingga tragedi kemanusiaan yang memicu kemarahan kolektif membara. Seorang warga lanjut usia bernama Ibu

Yonih (62 tahun) dilaporkan meninggal dunia akibat kelelahan ekstrem saat mengantre gas di Tangerang Selatan. Insiden ini berfungsi sebagai peristiwa pemfokus (*focusing event*) yang mengubah isu teknis distribusi energi menjadi krisis legitimasi moral pemerintah. Kematian warga negara dalam upaya memenuhi kebutuhan dasarnya dianggap sebagai bukti kegagalan negara melindungi rakyatnya, memicu gelombang protes yang meluas dari ruang fisik ke ruang digital .

Platform media sosial X (sebelumnya Twitter) menjadi arena utama bagi publik untuk mengonsolidasikan perlawanan. Tagar-tagat protes seperti #IndonesiaGelap dan tuntutan "PENTOL" mendominasi topik pembicaraan nasional (*trending topic*), menyatukan jutaan suara

kekecewaan menjadi tekanan politik yang nyata. Fenomena viralitas ini membuktikan kekuatan baru partisipasi publik di era digital, di mana tekanan warganet mampu bertindak sebagai kekuatan veto informal. Hanya dalam waktu empat hari pasca-implementasi, tepatnya pada 4 Februari 2025, pemerintah dipaksa membatalkan kebijakan tersebut akibat besarnya tekanan opini publik .

Penelitian ini menjadi sangat urgen untuk membedah bagaimana mekanisme tekanan digital mampu membatalkan kebijakan formal negara dalam waktu singkat. Menggunakan lensa *Multiple Streams Framework* (MSF) dan pendekatan *Mixed-Methods Social Network Analysis* (MMSNA), studi ini bertujuan menganalisis dinamika pembatalan tersebut dengan memetakan bagaimana aliran masalah

(kelangkaan dan korban jiwa), aliran kebijakan (regulasi pembatasan), dan aliran politik (tekanan viral) bertemu dan memaksa perubahan agenda pemerintah.

KAJIAN TEORI

Penelitian ini menggunakan *Multiple Streams Framework* (MSF) yang digagas oleh John W. Kingdon (1984) sebagai pisau analisis utama. MSF menolak asumsi bahwa kebijakan publik adalah hasil dari proses rasional-linear. Sebaliknya, Kingdon memandang kebijakan sebagai hasil pertemuan dari tiga aliran independen yang bergerak dalam sistem yang anarkis sebagai berikut:

- a. Aliran Masalah (*Problem Stream*): Berisi kondisi sosial yang mendapatkan perhatian publik dan didefinisikan sebagai masalah yang menuntut

intervensi. Perubahan dari "kondisi" menjadi "masalah" pada fenomena ini ditandai oleh: a. Narasi kelangkaan analisis cuitan atau berita yang mengungkapkan kelangkaan elpiji 3 kg; b. Identifikasi keluhan melalui akun Twitter atau kelompok masyarakat yang aktif menyuarakan keluhan; b. Sentimen netizen terhadap kebijakan.

- b. Aliran Kebijakan (*Policy Stream*): di mana ide-ide dan alternatif solusi dikembangkan oleh komunitas ahli dan birokrat. Solusi dianggap matang jika layak secara teknis dan akseptabel secara nilai, pada fenomena ini ditandai oleh: a. Aktor pembawa ide solusi siapa yang membawa

narasi solusi dan kekuatan mempengaruhi opini masyarakat; b. Penerimaan wacana kebijakan bagaimana publik menanggapi usulan pemerintah dan elite; c. Pertarungan ide perbandingan narasi kebijakan antara pemerintah dan warganet – pemangku kebijakan

- c. Aliran Politik (*Political Stream*): Mencakup dinamika non-teknis pada fenomena ini ditandai oleh: a. Identifikasi aktor aliansi dan oposisi wacana yang mendukung atau menolak kebijakan pelarangan pengecer LPG; b. Pola keterhubungan aktor Siapa yang paling banyak disebut, di mention, atau dikutip; c. Mobilisasi dan tekanan publik analisis aksi

(petisi, tagar viral).

Kingdon menjelaskan bahwa perubahan kebijakan terjadi ketika ketiga aliran ini bertemu pada momen kritis yang disebut Jendela Kebijakan (*Policy Window*). Momentum ini kemudian dimanfaatkan oleh Wirausahawan Kebijakan (*Policy Entrepreneur*) yang bertindak menyambungkan (*coupling*) masalah yang mendesak dengan solusi politik yang tersedia.

METODE PENELITIAN

Studi ini menerapkan desain *Mixed-Methods Social Network Analysis* (MMSNA) yang mengintegrasikan analisis jaringan struktural dengan analisis konten berbasis *Deep Learning*.

Sumber Data: Data jejak digital primer diperoleh dari *platform X* (Twitter) menggunakan teknik

crawling pada periode krisis kebijakan (29 Januari – 4 Februari 2025).

Parameter Data: Pengambilan data menggunakan kata kunci spesifik: “LPG”, “LPG 3KG”, “Elpiji”, “Gas 3 KG”, dan “Gas Melon”¹⁴. Total data bersih yang dianalisis berjumlah 2.250 percakapan.

Teknik Analisis:

a. Social Network Analysis (SNA)

Menggunakan perangkat lunak Gephi untuk memetakan struktur jaringan, aktor sentral, dan pola interaksi (relasional).

b. Analisis Sentimen (IndoBERT)

Menggunakan model bahasa *pre-trained* IndoBERT (Indonesian BERT) untuk mengklasifikasikan sentimen (Positif, Negatif, Netral) dan menganalisis teks secara kontekstual (*bidirectional*).

c. Analisis Word Cloud

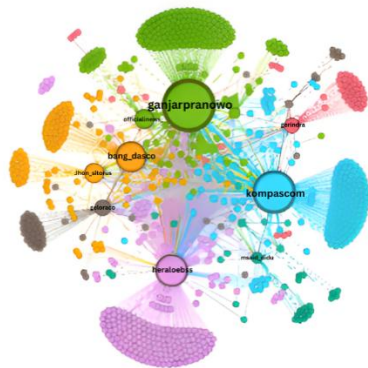
Visualisasi frekuensi kata untuk menangkap narasi dominan dalam setiap kategori sentimen.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Temuan penelitian

a. Visualisasi SNA

Gambar 1. Hasil Olah Data SNA



Sumber: Diolah Peneliti, 2025

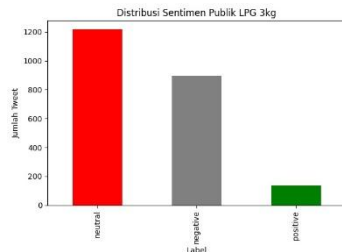
Hasil visualisasi SNA menunjukkan jaringan yang terdiri dari 836 aktor dan 1.476 interaksi dengan tingkat densitas yang rendah (*Average Degree* 1,766). Temuan paling signifikan adalah tingginya nilai Modularitas (0,398), yang

membuktikan terbentuknya kluster-kluster terpisah yang eksklusif.

Peta jaringan memperlihatkan keterputusan (*structural hole*) yang serius. Klaster Berita/Media (Biru & Abu) terisolasi dan tidak terhubung dengan klaster diskusi politik yang panas (Oranye, Hijau, Pink). Hal ini mengindikasikan fenomena *Echo Chamber*: Pemerintah dan media resmi berbicara dalam ruang gema mereka sendiri, sementara publik dan aktor politik berdiskusi di ruang terpisah tanpa jembatan dialog. Informasi kebijakan teknokratis dari pemerintah tidak menembus percakapan publik yang didominasi oleh narasi krisis alhasil bentuk narasi yang dibawa oleh masing-masing gugus berkembang liar tanpa adanya diskusi tesa-antitesa antara pemerintah, masyarakat (netizen) dan media massa

b. Distribusi Sentimen (IndoBert)

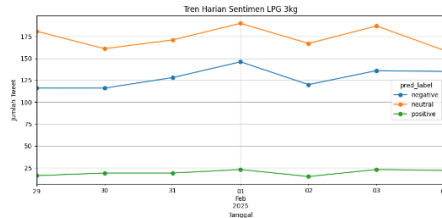
Gambar 2. Olah Data *IndoBert*



Sumber: Diolah Peneliti, 2025

Distribusi sentimen menunjukkan dominasi respons non-positif. Sentimen Netral (54,04%) dan Negatif (39,87%) mendominasi, sementara sentimen Positif sangat minim (6,09%).

Gambar 3. Tren Sentimen *Netizen*



Sumber: Diolah Peneliti, 2025

Tren Harian Sentimen LPG 3kg, Sepanjang periode observasi (29 Jan - 04 Feb 2025), volume percakapan tertinggi secara konsisten dipegang oleh sentimen netral (garis oranye),

diikuti oleh sentimen negatif (garis biru), Sentimen positif (garis hijau) berada di tingkat yang sangat rendah dan relatif stagnan. Tren kenaikan yang stabil untuk sentimen negatif dan netral sejak tanggal 29 Januari, yang mencapai kulminasi atau puncak tertinggi pada 01 Februari 2025.

c. Visualisasi *WordCloud*

Gambar 4. *Word Cloud* Negatif



Sumber: Diolah Peneliti, 2025

Word Cloud Negatif: Didominasi kata "Langka", "Antri", "Susah", "Mahal", dan "Rakyat". Ini adalah validasi empiris bahwa publik mengalami penderitaan fisik dan ekonomi secara nyata.

Gambar 5. Word Cloud

Netral & positif



Sumber: Diolah Peneliti, 2025

Word Cloud Netral & Positif:

Secara paradoksal didominasi oleh kata "Masalah" dan "Tidak Puas". Hal ini menunjukkan bahwa sentimen netral bukanlah sikap apatis, melainkan pelaporan objektif atas masalah yang terjadi. Sedangkan sentimen positif muncul sebagai respons apresiasi (solusi) terhadap pembatalan

kebijakan, bukan dukungan terhadap kebijakan awal.

Analisis Temuan Penelitian

a. Aliran Masalah (Problem Stream)

Aliran ini meledak akibat akumulasi indikator kelangkaan yang tervalidasi oleh data IndoBERT. Narasi kelangkaan ditemukan kuat dari 2250 cuitan masyarakat pada platform X. Beberapa aktor yang terlibat dalam rangka menyuarakan keluhan masyarakat diantaranya: @heraloebss, @JhonSitorus_18 @ganjarpranowo dan @msaid_didu Dan umpan balik netizen Netral: 1216 tweet (54.04%), Negatif: 897 tweet (39.87%), Positif: 137 tweet (6.09%). Angka tersebut diperoleh melalui analisis *indobert* yang ketiga kelompok sentimen tersebut (netral, negatif dan positif) di dominasi kata “*masalah*” dan “*tidak*

puas”. Masyarakat menghadapi antrean panjang, harga mahal, kelangkaan, ketidakpuasan dan kematian

Puncaknya terjadi melalui peristiwa yang menarik perhatian publik (*Focusing Event*) kematian Ibu Yonih pada 3 Februari 2025. Kemudian gerakan "Indonesia Gelap" dan tuntutan P.E.N.T.O.L (Polisi, Energi, Naikkan Taraf Hidup, dll) adalah salahsatu manifestasi keresahan dan tragedi ini.

b. Aliran Kebijakan (Policy Stream)

Sejumlah tiga solusi yang disampaikan aktor yang memiliki pengaruh yang besar, diantaranya:

1. Rieke Diah Pitaloka anggota DPR RI,
2. Mada Fahmy Radhi. pengamat ekonomi energi UGM dan;
3. Sufmi Dasco ketua DPP Harian

Partai Gerindra dan Wakil Ketua DPR RI.

Ketiganya memiliki pengaruh yang besar, dan terdapat kesamaan dari saran dan solusi dari ketiganya adalah melakukan kajian ulang terhadap Kebijakan Pembatasan Distrubusi Gas Subsidi 3kg di Tingkat sub-Penyalur. Solusi ini disambut hangat dan didukung penuh oleh netizen melalui bukti-bukti *re-tweet* pada *platform X* Perumusan Kebijakan tidak dibahas komprehensif

c. Aliran Politik (Political Stream)

Terdapat temuan anomali yakni Kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah ditolak oleh pemerintah. Hubungan ini terjadi antara Presiden Prabowo dengan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia. Pasalnya Kebijakan yang

dikeluarkan oleh pemerintah mengundang masalah yang cukup serius diantaranya antrean Panjang, kelangkaan hingga korban jiwa, Alih-alih bertanggung jawab sebagai pemerintah pembuat kebijakan. Presiden Prabowo melalui Sufmi Dasco menyampaikan bahwa Kebijakan ini bukan permintaan Pak Presiden.

Hasan nasbi (Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) dilainsisi menegaskan bahwa kebijakan ini sudah tepat. Terlepas dari itu amarah masyarakat tidak lain ditujukan kepada Bahlil selaku Menteri dan pemerinthan melalui tagar-tagar dan Gerakan aktivisme sosmed. Rentetan peristiwa menunjukkan terjadi disrupsi kepentingan dan komunikasi dalam pengambilan Keputusan pada pemerintah pusat.

d. Jendela Kebijakan (Policy Windows) dan Wirausaha Kebijakan (Policy Entrepreneur)

Ketiga aliran bertemu pada 1-4 Februari 2025, membuka *Policy Window*. Presiden Prabowo bertindak sebagai *Policy Entrepreneur* dengan memanfaatkan momentum ini. Ia melakukan *coupling*. mengambil masalah rakyat (problem stream) dan tekanan politik (political stream), lalu menyatukannya dengan solusi pragmatis yakni pembatalan kebijakan. Tindakan ini menandai pergeseran dari *Evidence-Based Policy* menuju *Sentiment-Based Policy*, di mana keputusan diambil berdasarkan kalkulasi sentimen digital untuk memulihkan stabilitas.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis MSF dan MMSNA, penelitian ini menyimpulkan dua hal utama sesuai tujuan penelitian:

Bagaimana pengaruh respons masyarakat terhadap kebijakan, tidak lagi sekadar riuh rendah digital, melainkan bertindak sebagai determinan kebijakan. Tekanan publik yang masif mengubah "kondisi" (antrean gas) menjadi "krisis politik" melalui amplifikasi *focusing event* (kematian warga) dan narasi viral #IndonesiaGelap. Tekanan ini berhasil membuka *Policy Window* yang memaksa *Policy Entrepreneur* (Presiden) membatalkan kebijakan formal demi meredam gejolak sosial.

Faktor Penyebab Penolakan Publik penolakan masif dipicu oleh konvergensi antara penderitaan fisik

(kelangkaan, antrean, harga mahal) dengan ketidakpercayaan politik. Publik menolak kebijakan karena adanya diskoneksi antara rasionalitas teknokratis pemerintah (efisiensi subsidi) dengan realitas sosiologis di lapangan (ketidaksiapan infrastruktur). Selain itu, narasi politik mengenai "Geng Solo" dan ketidakpuasan terhadap kinerja 100 hari pemerintah memperparah resistensi, menjadikan isu LPG sebagai kanal pelampiasan kekecewaan terhadap kontrak sosial baru.

SARAN

Merujuk pada kesimpulan di atas, rekomendasi strategis dirumuskan sebagai berikut:

- a. Integrasi *Early Warning System* Berbasis Sentimen: Pemerintah (Kementerian ESDM) harus

mengintegrasikan analisis sentimen *real-time* (seperti IndoBERT) ke dalam prosedur *Agenda Setting*. Pengambilan keputusan tidak boleh hanya bergantung pada data stok (*supply-side*), tetapi wajib memvalidasi persepsi publik (*demand-side*) untuk mendeteksi potensi krisis sebelum meledak.

- b. Strategi Komunikasi Inklusif: Mengingat temuan isolasi struktural (*echo chamber*), pemerintah perlu mengubah strategi komunikasi dari sosialisasi satu arah menjadi pelibatan jejaring. Kerjasama dengan *Key Opinion Leaders* (KOL) yang memiliki

sentralitas tinggi di luar lingkaran pemerintah diperlukan untuk menembus algoritma dan menyampaikan substansi kebijakan secara efektif

- c. Pelembagaan *Social Stress-Test*: Sebelum implementasi kebijakan berskala nasional yang sensitif, wajib dilakukan uji beban sosial (*social stress-test*) pada skala terbatas. Hal ini bertujuan untuk mengukur kesenjangan antara asumsi teknokratis dengan kesiapan infrastruktur riil di lapangan, guna mencegah terulangnya krisis legitimasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Arafat. (2023). *Kebijakan Publik: Teori dan Praktik*. Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Indonesia.
penerbitlitnus.co.id/id/eprint/235/1/KEBIJAKAN_PUBLIK_TEORI_DAN_PRAKTIK.pdf
- BPKN. (2025, 4 Februari). Kebijakan pendistribusian LPG 3 kg harus dievaluasi, hak konsumen mesti terpenuhi. [BPKN.go.id](https://bpkn.go.id).
<https://bpkn.go.id/beritaterkini/detail/kebijakan-pendistribusian-lpg-3-kg-harus-dievaluasi-hak-konsumen-mesti-terpenuhi>
- Chu, Donna. (2018). Media Use and Protest Mobilization: A Case Study of Umbrella Movement Within Hong Kong Schools. *SocialMedia + Society*. 4. 205630511876335. [10.1177/2056305118763350](https://doi.org/10.1177/2056305118763350).
- Dini Daraini Anwar, Kunto Adi Wibowo, HENNY SRI MULYANI ROHAYATI. Pengaruh Penggunaan Media Sosial X (Twitter) Terhadap Partisipasi Politik Pada Pemilu Presiden Republik Indonesia Tahun 2024
 DOI:
<http://dx.doi.org/10.31506/jrk.v15i2.29129>
- Drone Emprit. (2025, February 6). Gas LPG 3 KG: Isu viral dan analisis sentimen publik. <https://droneemprit.id/gas-3kg-lpg>
- Flamino, J., et al. (2021). Shifting Polarization and Twitter News Influencers between two U.S. Presidential Elections. <https://doi.org/10.48550/arXiv.2111.02505>
- Kingdon, J. W. (2011). *Agendas, Alternatives, and Public Policies* (Updated 2nd ed.). Longman.
- Knaggård, Å. (2015). The multiple streams framework and the problem broker. *European Journal of Political Research*, 54(3), 450–465.
<https://doi.org/10.1111/1475-6765.12097>

- Kominfo. (2023). Survei Nasional Perilaku Digital Masyarakat Indonesia.
- Kompas. (2025, February 9). Pemerintah Cabut Larangan Penjualan Eceran Elpiji 3 Kg. <https://money.kompas.com/read/2025/02/09/080000/pemerintah-cabut-larangan-penjualan-eceran-elpiji-3-kg>
- Koto, F., Rahimi, A., Lau, J. H., & Baldwin, T. (2020). IndoLEM and IndoBERT: A Benchmark Dataset and Pre-trained Language Model for Indonesian NLP. Dalam *Proceedings of the 28th International Conference on Computational Linguistics* (hlm. 755–766). International Committee on Computational Linguistics. <https://aclanthology.org/2020.coling-main.66>
- Manit, J., Kolpakov, A., & Eubank, W. (2020). Analyzing Social Policy from a Network Perspective. *Advances in Social Work*. <https://doi.org/10.18060/22631>.
- Tempo. (2025, February 8). Kelangkaan Elpiji 3 Kg: DPR Soroti Pemerintah. <https://bisnis.tempo.co/read/1804678/kelangkaan-elpiji-3-kg-dpr-soroti-pemerintah-gagal-antisipasi>
- Kuangan, K.R.I. (2025). *Menkeu sebut 68 persen konsumsi LPG 3 kg bersubsidi dinikmati orang mampu*. ANTARANews. <https://www.antaranews.com/berita/3082193/sri-mulyani-68-persen-konsumsi-lpg-3-kg-dinikmati-orang-mampu>